

**DIPLOMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(DPR RI) KE *ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM* (APPF) DALAM
MELINDUNGI CITRA UMAT MUSLIM DALAM KASUS TERORISME
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



OLEH :

ABDUL HAFIEDZ RIZQO ARDIANSYAH

(07041281823099)

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**DIPLOMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA (DPR RI) KE *ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM*
(APPF) DALAM MELINDUNGI CITRA UMAT MUSLIM DALAM
KASUS TERORISME DI INDONESIA**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1

Oleh :

Abdul Hafiedz Rizqo Ardiansyah

07041281823099

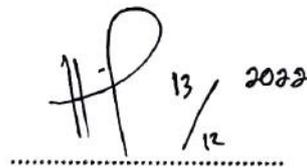
Pembimbing 1

Drs. Djunaidi, M. S. L. S
NIP. 196203021988031004

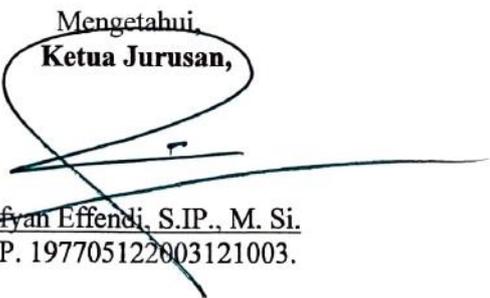


Pembimbing 2

Indra Tamsyah, S. IP., M. Hub. Int.
NIDN. 1610082505890002



Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M. Si.
NIP. 197705122803121003.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“DIPLOMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA (DPR RI) KE *ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY
FORUM* (APPF) DALAM MELINDUNGI CITRA UMAT
MUSLIM DALAM KASUS TERORISME DI INDONESIA”**

Skripsi

Oleh :

**Abdul Hafiedz Rizqo Ardiansyah
07041281823099**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 8 Maret 2023**

Pembimbing :

1. Drs. Djunaidi, M. S. L. S
NIP. 196203021988031004
2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808

Tanda Tangan



Penguji :

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
NIP. 1571071104890001
2. Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA
NIDN. 8948340022

Tanda Tangan



Mengetahui,

**Ketua Jurusan Hubungan
Internasional UNSRI,**



**Prof. Dr. Alfiri, M.Si
NIP. 196601221990031004**

**Sofyan Effendi, S.IP., M. Si
NIP. 197705122003121003.**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Abdul Hafiedz Rizqo Ardiansyah

NIM : 07041181823001

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Diplomasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ke Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) Dalam Melindungi Citra Umat Muslim Dalam Kasus Terorisme Di Indonesia” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 25 Desember 2022
ng Membuat Pernyataan



Abdul Hafiedz Rizqo Ardiansyah
NIM. 07041281823099

ABSTRAK

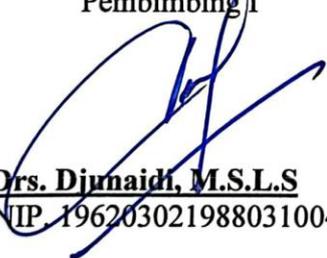
Diplomasi parlemen merupakan diplomasi yang dilakukan oleh parlementer yang track diplomacynya ditengah pemerintah dan non pemerintah. Indonesia memiliki parlemen yakni DPR RI dalam melakukan diplomasi parlemennya, dan DPR RI mempunyai Badan Kerja Sama Antar Parlemen untuk memperkokoh diplomasi parlemen demi mencapai kepentingan nasional di forum – forum internasional. Melalui BKSAP inilah DPR RI mempunyai ruang untuk melakukan diplomasi parlementer secara aktif dengan menjadi anggota, pengurus, dan dalam beberapa kesempatan menjadi penggagas, organisasi parlemen regional dan internasional serta menjalin hubungan bilateral dengan parlemen negara lain. Berbagai masalah kontemporer yang terkait dengan kepentingan Indonesia seperti isu-isu terorisme yang merupakan isu penting yang menjadi perhatian anggota DPR RI dalam berbagai forum pertemuan internasional di Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF).

Kata kunci : Asia Pacific Parliamentary Forum, Diplomasi parlemen, Resolusi, Terorisme

Indralaya, 20 Maret 2023

Mengetahui

Pembimbing I


Drs. Djurnaidi, M.S.L.S
NIP. 196203021988031004

Pembimbing II


Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808

Disetujui oleh,

Ketua Program Studi,


Sofyan Effendi, S.IP., M. Si
NIP. 197705122003121003.

ABSTRACT

Parliamentary diplomacy is diplomacy carried out by parliamentary whose diplomacy track is between government and non-government. Indonesia has a parliament, namely the DPR RI in carrying out its parliamentary diplomacy, and the DPR RI has an Inter-Parliamentary Cooperation Agency to strengthen parliamentary diplomacy in order to achieve national interests in international forums. It is through this BKSAP that the DPR RI has the space to actively carry out parliamentary diplomacy by becoming a member, administrator, and on several occasions being the initiator of regional and international parliamentary organizations and establishing bilateral relations with parliaments of other countries. Various contemporary issues related to Indonesia's interests such as issues of terrorism which are important issues of concern to members of the Indonesian Parliament in various international meeting forums at the Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF).

Key word : Asia Pacific Parliamentary Forum, Parliamentary Diplomacy, Resolution, Terrorisme.

Indralaya, 7⁰ Maret 2023

Mengetahui

Pembimbing I

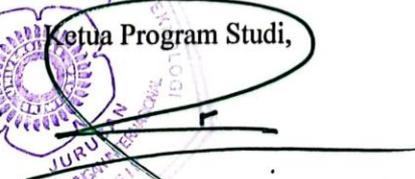

Drs. Djunaidi, M.S.L.S
NIP. 196203021988031004

Pembimbing II


Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808

Disetujui oleh,

Ketua Program Studi,


Sofyan Effendi, S.IP., M. Si
NIP. 197705122003121003.

”

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan rezeki kesehatan, kemampuan dan kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Diplomasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) Dalam Melindungi Citra Umat Muslim Dalam Kasus Terorisme di Indonesia” dengan baik. Sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wassalam yang menjadi panutan dalam semangat belajar menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang telah saya capai hingga saat ini semata-mata bukan karena usaha yang saya lakukan sendiri, melainkan karena karunia Allah Azza wa Jalla dan doa yang tiada henti dilangitkan oleh kedua orang tua saya. Selama penyusunan skripsi ini saya mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan disekeliling saya, untuk itu pada lembar ini saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Djunaidi M.S.L.S yang telah membimbing saya dari KKHI hingga Sidang Skripsi dan juga Bapak Indra Tamsyah, S.IP M.Hub Int yang telah menyediakan waktu, tenaga maupun pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Ma'am Yuaniarsi selaku dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan dari awal hingga akhir;
3. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si, miss Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA, dan pak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A selaku dosen pembahas yang telah membimbing dan memberikan saran yang sangat bermanfaat bagi penelitian di skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
7. Mbak siska selaku Admin HI yang telah mengurus semua tetek bengek dalam berkas pemberkasan dalam kegiatan akademik
8. Teman – teman HI C 2018 yang telah meramaikan situasi kelas dalam kegiatan belajar mengajar, terutama Bobby yang sangat *Support* dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional.

Palembang, 20 Maret 2023

Penulis



Abdul Hafiedz Rizqo Ardiansyah
07041281823099

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Kerangka Konseptual	17
2.3. Alur Pemikiran	19
2.4. Argumentasi Utama	19
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20
3.1. Desain Penelitian	20
3.2. Definisi Konsep	21
3.3. Fokus Penelitian	21
3.4. Unit Analisi	24
3.5. Jenis dan Sumber Data	24
3.6. Teknik Pengumpulan Data	25
3.7. Teknik Keabsahan Data	26
3.8. Teknik Analisi Data	26

BAB IV	29
GAMBARAN UMUM	29
4.1 Perkembangan Diplomasi Parlemen Indonesia	29
4.2. Sejarah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF).....	32
4.3 Sejarah Perkembangan Terroris di Dunia	33
4.4 Sejarah Terrorisme di Indonesia	35
BAB V	44
PEMBAHASAN.....	44
5.1 Fungsi Politik.....	44
5.1.1 Mengidentifikasi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia 2017 - 2020.	45
5.1.2 Mempromosikan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.....	46
5.2 Fungsi Kelembagaan.....	47
5.2.1 Mengikuti Forum Parlemen Internasional Serta Organisasi Internasional. ..	48
5.2.2 Resolusi DPR RI Tahun 2017 – 2020 ke APPF	50
5.2.3 Ratifikasi Perjanjian Internasional	56
BAB VI.....	58
PENUTUP.....	58
6.1 Kesimpulan	58
6.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR SINGKATAN

PBB	= Perserikatan Bangsa – Bangsa
DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
APPF	= Asia Pacific Parliamentary Forum
BKSAP	= Badan Kerjasama Antar Parlemen
BNPT	= Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
AIPA	= <i>ASEAN Inter-Parliamentary Assembly</i>
APA	= <i>Asian Parliamentary Assembly</i>
IPPP	= <i>Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership</i>
IPU	= <i>Inter-Parliamentary Union</i>
PUIC	= <i>Parliamentary Union of the OIC Member States</i>
WPFSD	= <i>World Parliamentary Forum on Sustainable Development</i>
GOPAC	= <i>Global Organization of Parliamentarians Against Corruption</i>
WPL	= <i>Women Political Leaders</i>
OECD	= <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
IMF	= <i>International Monetary Fund</i>
WB	= <i>World Bank</i>
WTO	= <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.1.....	6
-------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.....	42
----------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penelitian ini berupaya menjelaskan diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI untuk menjaga citra umat muslim dalam lingkup kasus Terorisme yang sebagaimana kebanyakan masyarakat Domestik maupun Internasional telah beranggapan sebuah tindakan terorisme ini adalah bagian dari Islam. Padahal Islam sendiri tidak pernah mengajarkan hal yang merugikan bagi umat manusia baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan banyaknya stigma bahwa aksi terorisme adalah bagian dari ajaran Islam.

Dalam membahas suatu hubungan internasional, tentunya akan berbicara tentang kegiatan diplomasi. Diplomasi sendiri adalah sebuah seni bernegosiasi dengan negara lain untuk mencapai sebuah kepentingan nasional, dan diplomasi biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut diplomat atau diplomator yang mewakili sebuah negara atau organisasi tertentu. Diplomasi yang sederhana dan yang paling tua adalah Diplomasi Publik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat Internasional dua negara untuk melakukan negosiasi, tak hanya itu tetapi juga bisa negara dengan Organisasi Internasional. Dalam situasi internasional saat ini, diplomasi harus dilakukan untuk memperkuat hubungan dengan negara lain.

Diplomasi Publik merupakan suatu hubungan antar negara dan masyarakat Internasional yang memiliki beragam metode untuk menyampaikan atau menjelaskan kepentingan nasional dalam suatu negara dan juga kebijakannya. Diplomasi Publik adalah kunci untuk mempengaruhi masyarakat Internasional maupun domestic pada era globalisasi pada saat ini. Karena Diplomasi Publik adalah elemen dari diplomasi *Soft Power*. Dan Diplomasi Publik telah terbukti memiliki dampak yang besar bagi perubahan persepsi masyarakat International maupun Domestik.

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas islam dan Indonesia juga merupakan negara yang umat muslimnya terbanyak di dunia. Dalam hal ini ada Dengan perkembangan zaman sekarang ini banyak yang membuat pemikiran – pemikiran baru untuk membuat suatu hal yang bisa membuat kepuasan tersendiri, hal tersebut bisa menimbulkan dampak positif dan negatif, tetapi tampak banyak sisi negatifnya. Karena kebanyakan hal tersebut hanya untuk mementingkan suatu individu atau beberapa kelompok saja, tidak untuk seluruh masyarakat. Teroris sendiri adalah pemahaman yang menyimpang dari kemanusiaan karena pemahaman tersebut dapat menimbulkan kerusakan – kerusakan yang mampu menghancurkan suatu negeri dengan terror yang diciptakan oleh gerakan – gerakan yang mengatasnamakan ideology fundamental yang telah menempatkan dirinya dalam arus ketakutan yang berdampak signifikan bagi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan nasional maupun internasional.

Maraknya aksi terorisme telah menimbulkan stigma bagi umat islam khususnya di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim. Karena pelaku

(teroris) kebanyakan beragama islam, mereka pun akhirnya mengklaim bahwa perbuatan tersebut dengan jihad fisabilillah, padahal bukan. Mereka para pelaku berdalih bahwa perbuatan mereka itu untuk melawan ketidakadilan pemerintah dalam berkuasa dan juga dalam perwujudan penindasan yang dialami Negara – Negara yang berada di timur tengah yakni Irak, Afghanistan, dan Palestina.

Awal mula yang membuat sorotan public nasional dan internasional mengenai terorisme adalah kasus 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat. Dengan adanya sebuah pesawat yang menabrak gedung WTC di New York yang terjadi pada tanggal 9 November 2001. Setelah dari kejadian tersebut masyarakat Internasional memulai waspada terhadap kelompok yang melakukan aksi terror tersebut, dan kelompok yang melakukan aksi tersebut terindikasi beragama Islam, dan membuat pemahaman bahwa Agama Islam membenarkan aksi terorisme yang dilakukan kelompok tersebut.

Tidak jauh dari kejadian tersebut, Indonesia juga mengalami kejadian terorisme pada tahun 2002 di Bali. Serangan tersebut dikenal sebagai Bom Bali yang menewaskan 202 orang, dan dari banyak korban tersebut ada beberapa Tourist dari beberapa negara. Dari kejadian ini pemerintah Indonesia sadar bahwa kasus Terorisme ini sebuah ancaman yang nyata untuk dibasmi. Dan tentu pelaku dari Bom Bali tersebut adalah orang yang terindikasi agama Islam dan tentunya hal tersebut sangat membuat citra buruk Islam bahwasanya aksi terorisme adalah bagian dari Islam yang berdalih dari Jihad Fii Sabilillah. Dengan adanya mulai

serangan terorisme di Indonesia, pemerintah pun membuat sebuah Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010.

Asia Pacific Parliamentary Forum merupakan kumpulan parlemen di negara Asia Pasifik yang diadakannya konferensi setiap tahun di berbagai negara. Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) didirikan oleh mantan perdana menteri Jepang yaitu adalah Yasuhiro Nakasone. Pertemuan persiapan pertama Forum Parlemen Asia-Pasifik diadakan di Singapura pada bulan Agustus 1991. Anggota parlemen dari sembilan negara (Australia, Kanada, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Singapura dan Amerika Serikat) hadir. Pada bulan Desember 1991. Pertemuan persiapan kedua diadakan di Canberra dengan perwakilan dari sembilan negara asli bergabung dengan anggota parlemen dari Republik Rakyat Cina, Meksiko, Negara Federasi Mikronesia, Papua Nugini, Thailand, dan Brunei (dengan status pengamat). Pertemuan persiapan ini membentuk komite pengarah yang diketuai oleh Hon Yasuhiro Nakasone, dengan anggota dari Australia, Jepang, Korea, Thailand (perwakilan ASEAN) dan Amerika Serikat. (APPF, 2021)

Dan selanjutnya Pertemuan pendiri *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) berlangsung di Tokyo pada Januari 1993. Para peserta mengadopsi Deklarasi Tokyo yang menentukan bidang utama kegiatan forum. Tujuan APPF sendiri ialah untuk memperluas kerja sama antara anggota untuk kepentingan perdamaian dan stabilitas, mempromosikan perdagangan dan investasi, mengembangkan kerja sama regional dibidang - bidang seperti perlindungan

lingkungan, dan melawan kejahatan trans-nasional dan terorisme, pertukaran budaya dan akademik, dll. (Council)

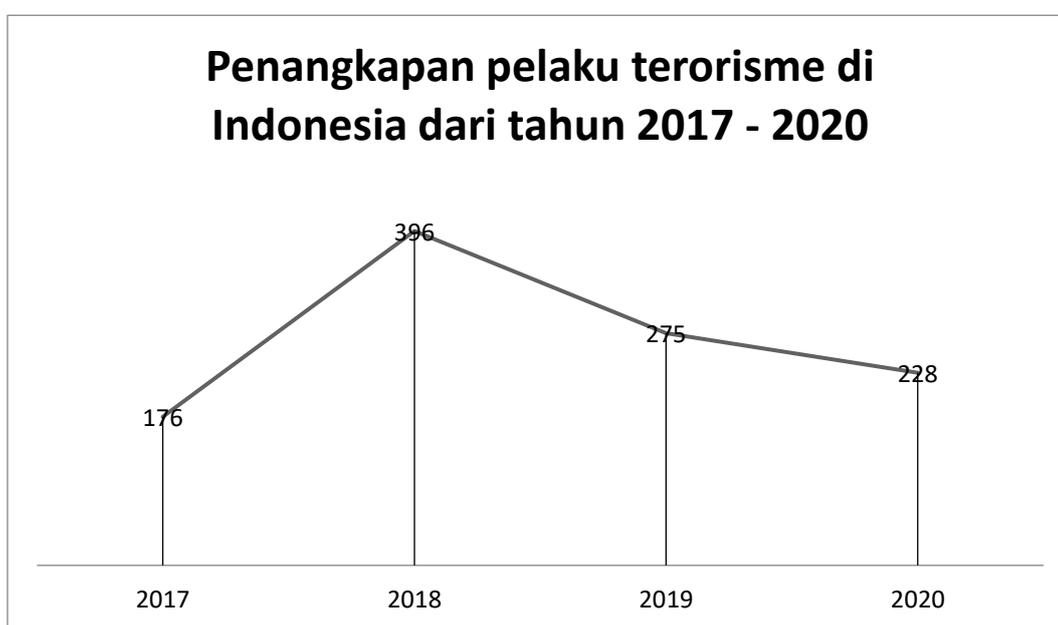
Saat ini *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) memiliki 28 negara anggota yang dibagi 4 sub wilayah yaitu : Northeast Asia, Southeast Asia, Ocenia, Americas. Dan adapun negara anggotanya ialah : Australia, Kanada, Chili, Kamboja, Kolombia, China, Ekuador, Fiji, Kosta Rika, Laos, Indonesia, Jepang, Mikronesia, Malaysia, Kepulauan Marshall, Meksiko, Selandia Baru, Mongolia, Papua New Guinea, Filipina, Peru, Republik Korea, Singapura, Rusia, Amerika Serikat, Thailand, dan Vietnam (Council). Bahasa resmi yang dipakai di organisasi ini adalah Inggris.

DPR RI telah menjadi anggota Organisasi *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) sejak tahun 1991. Hingga saat ini keanggotaan DPR RI di APPF masih aktif dan telah melakukan banyak konferensi di beberapa tempat negara anggota, Indonesia salah satunya pernah menjadi tuan rumah dalam konferensi APPF di Jakarta, Ibu Kota Negara pada tahun 2006. Dengan dilakukannya konferensi - konferensi ini, para negara anggota mengupayakan untuk melakukan visi misi dari Organisasi tersebut yaitu menjaga perdamaian di dunia, dan melakukan kerja sama dalam bidang apapun untuk memajukan negara – negara anggota

DPR RI adalah salah satu yang hadir pada pertemuan pertama pada pembuatan Organisasi ini di Singapura pada tahun 1991. Sebagai salah satu perlisian dari APPF dan negara dengan populasi umat islam terbesar di dunia, DPR RI selalu mengambil singgap dalam pembahasan di forum APPF yang

diselenggarakan tiap tahunnya. Melihat maraknya aksi teroris yang terjadi di berbagai wilayah dunia, DPR RI sebagai perwakilan Indonesia yang masyarakatnya mayoritas umat muslim dan populasi umat muslim terbanyak di dunia, selalu ambil peran dalam pembahasan terorisme dan menekankan bahwa aksi terorisme itu bukan dari golongan apapun termasuk dari Agama Islam.

Grafik 1.1.1



Dalam Diagram diatas terlihat bahwa dalam kasus penangkapan pelaku terorisme pada tahun 2017 berjumlah 176, pada tahun 2018 berjumlah 396, pada tahun 2019 berjumlah 275, dan pada tahun 2020 berjumlah 228. Dalam diagram tersebut terlihat dinamis dengan meningkatnya kasus dari 2017 ke 2018, dan adanya penurunan 2018 ke 2020.

Dengan letupan terorisme yang terjadi di Bali yakni kasus Bom Bali pada tahun 2002, sehingga maraknya kasus terorisme yang terjadi Indonesia hingga saat ini masih terjadi. Sebagai contoh pada tahun 2018 terjadinya bom bunuh diri di

Gereja Surabaya yang terjadi pada bulan Mei, dengan melakukan pengeboman di beberapa titik yakni Gereja, rususun di Sidoarjo, dan Polrestabes yang berada di Surabaya. Jika melihat dampak dari aksi terorisme ini mengakibatkan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) turun lebih dari 1% (Vincentia Wahyu Widajatun, 2019). Tidak hanya itu tentunya banyak warga lokal maupun Internasional menyalahkan bahwa aksi terorisme tersebut bagian dari Agama tertentu (Islam).

Sejak APPF didirikan, DPR RI telah berperan aktif. Berbagai keputusan-keputusan strategis yang merupakan inisiatif DPR RI telah mewarnai sidang-sidang APPF sebelumnya. Antara lain terkait isu strategis anti-terorisme dan stabilitas kawasan, antisipasi perang dagang dan kerjasama maritim serta perubahan iklim. (Ayu/es, 2020). Dalam kasus Terorisme di Indonesia sendiri DPR RI dalam forum APPF menegaskan bahwa para pelaku Terorisme sendiri merupakan jaringan dari ISIS bukan dari agama Islam yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa ISIS adalah suatu Organisasi yang menyimpang dengan memegang ideologi jihadis yang mereka kaitkan dengan nilai –nilai dari Islam. Dengan ini DPR RI melakukan Diplomasi dan Kerjasama untuk melakukan aksi Counter Terrorism di Asia Pasifik dan DPR RI menekankan bahwa aksi terorisme tersebut bukan dari agama tertentu (Islam).

Dalam mengatasi Terorisme Evita Nursanty mengungkapkan bahwa selama ini pelaksanaan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI dalam penanggulangan masalah terorisme internasional melalui forum Internasional diwujudkan dalam kerja sama bilateral dengan parlemen negara lain secara one to one, dan hubungan kerja sama multilateral. Namun demikian, peran DPR RI

sebagai individu dalam membangun *people to people contact*, juga menentukan keberhasilan diplomasi dalam mencapai tujuan politik luar negeri Indonesia. (Hendriyana, 2016)

Sebagai seorang muslim penulis tahu bahwa Islam sendiri tidak pernah mengajarkan pemahaman dan tindakan radikalisme dan terorisme. Karena yang penulis ketahui bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut adalah orang yang sesat pikiran dan hanya mengandalkan hawa nafsunya. Karena dalam agama sendiri tidak ada yang mendukung atau menyerukan tindakan tersebut untuk mencapai kepentingan akhirat atau ke dunia setelahnya. Bahwa seluruh agama itu mengajak seluruh umat manusia kepada perdamaian jikalau pun ada yang mengganggu perdamaian itu pasti ada hukumannya tertentu..

1.2.Rumusan Masalah

“Bagaimana Upaya Diplomasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* dalam menjaga citra umat muslim dalam kasus Terrorisme?”

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian biasanya muncul dari rumusan masalah yang ada sehingga memberikan gambaran objektif dalam suatu masalah tertentu. Dengan ini tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan usaha DPR RI dalam menjaga citra umat muslim yang sebagaimana masyarakat Indonesia merupakan

umat muslim terbanyak di dunia, ada kalanya untuk menjaga nama baik dan tentunya menjaga perdamaian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini ialah :

1. Dalam teori – teori yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam akademik terkait diplomasi yang dilakukan DPR RI ke APPF
2. Dalam ilmu praktiknya diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dalam literatur ilmiah untuk para penstudi maupun pengamat politik, dan agama sekalipun agar dapat memperluas wawasan dalam bagaimana diplomasi itu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, T. (2021). *Problem Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Times.
- Alexander Konkov, R. C. (2018). *PARLIAMENTARY DIPLOMACY AND ITS ROLE IN MODERN POLITICS*. Moscow: Re Thinking Russia.
- Amalia Rahmadhani, F. (2019). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Replubik Indonesia Dalam Melakukan Diplomasi Bagi Indonesia Tahun 2011 - 2017. *Binus Higher Education*, 12.
- APPF. (2021, December 15). *APPF Australia*. Retrieved from APPF President: <https://appfpresident.org/>
- Ayu/es. (2020, January 13). *Ketua DPR Nilai Forum Parlemen Asia Pasifik Penting bagi Indonesia*. Retrieved September 15, 2022, from DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27173/t/javascript>
- BKSAP. (2015). Jakarta: Media DPR RI.
- BKSAP. (2017). *Sidang ke 25 APPF*. Jakarta: Media DPR RI.
- BKSAP. (2018). *Sidang Ke 26 APPF*. Jakarta: Media DPR RI.
- BKSAP. (2019). *Sidang Ke 27 APPF*. Jakarta: Meida DPR RI.
- BKSAP. (2020). *Sidang Ke 28 APPF*. Jakarta: Media DPR RI.
- BNPT. (2014). *PUBInfo*. Retrieved 11 23, 2022, from Situs Portal Penyedia Informasi Layanan Publik: <http://www.pubinfo.id/>
- Council, F. (n.d.). *COBET*. Retrieved May 29, 2022, from The Federal Assembly of the Russian Federation: council.gov.ru/en/activity/crosswork/dep
- Farina Gandryani, F. H. (2021). Kedudukan Diplomasi Parlemen Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 38-51.
- Hendriyana, A. (2016, 01 15). *Aktif di Forum Inter-Parliamentary Union, Upaya DPR RI Tanggulangi Terorisme*. Retrieved 09 16, 2022, from Universitas Padjajaran: <https://www.unpad.ac.id/2016/01/aktif-di-forum-inter-parliamentary-union-upaya-dpr-ri-tanggulangi-terorisme/>
- Kemdikbud. (2022). *KBBI*. Jakarta: Digital Ocean.
- Mohammad Hasa ANsori, I. R. (2019). *Memberantas Terorisme di Indonesia Praktik, Kebijakan dan Tantangan*. Jakarta: The Habibie Center.

- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- MoU. (2018). Jakarta: Kemenlu.
- Muhamad, S. V. (2014). DPR RI DAN ISU PALESTINA DIPTOMASI ANTARPARLEM EN. 69-87.
- Rahmadhani, F. A. (2019). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Melakukan Diplomasi Bagi Indonesia Tahun 2011-2017. 3.
- Rakhmawati, D. (2011). Dialog Antar Iman Diplomasi Publik RI. *Departemen Hubungan Internasiuonal*, 25.
- RI, D. (2021, Desember 14). *E Media DPR RI*. Retrieved Oktober 5, 2022, from <https://emedia.dpr.go.id/article/peran-dpr-ri-dalam-asia-pacific-parliamentary-forum-appf/>
- Sari, I. P. (2021). Upaya Kerjasama Bilateral Indonesia-Amerika Serikat Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Tahun 2017-2019. *Repository Unsri*, 49-50.
- Sari, I. P. (2021). UPAYA KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-AMERIKA SERIKAT DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA TAHUN 2017-2019 . 44.
- Sayfullaev, D. (2016). PARLIAMENTARY DIPLOMACY IN MAKING OF FOREIGN POLICY . *International Journal of Development Research*, 8590-8592.
- Setwapres. (2021). *MUI, Rekan Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrul Ansyari, R. F. (2017). *DPR Ingin RI dan AS Tetap Kerjasama Perangi Terorisme*. Retrieved from VIVA.co.id
- Vincentia Wahyu Widajatun, N. M. (2019). KEJADIAN AKSI TERORIS DAN DAMPAKNYA PADA PERFORMA NILAI TUKAR DOLAR AMERIKA SERIKAT DAN PERFORMA IHSG. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* , 141-155.
- Yudhistira, A. W. (2021, March 29). *Datanoks*. Retrieved Desember 2, 2022, from Jaringan Media Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/29/dampak-terorisme-di-indonesia-tertinggi-keempat-di-asia-pasifik>